

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN MENGENAI
KUALITAS ASET BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

A. LATAR BELAKANG

POJK mengenai Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat merupakan penyempurnaan atas POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perekonomian Rakyat yang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan penyesuaian peraturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih serta kegiatan usaha yang diperkenankan sesuai dengan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, penerbitan standar akuntansi keuangan entitas privat yang merupakan pengganti dari standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik yang akan berlaku 1 Januari 2025, evaluasi terhadap permasalahan dan penyelesaian atas pemberian kredit pasca pandemi covid-19, dan penyesuaian dengan ketentuan terkini serta penyempurnaan pengaturan yang berbasis prinsip.

B. POKOK PENGATURAN

POJK mengenai Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat terdiri dari 10 (sepuluh) bab dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

BAB I – KETENTUAN UMUM

1. Aset adalah aset produktif dan aset nonproduktif
2. Aset Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan penyertaan modal.
3. Aset Nonproduktif adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR.

BAB II – KUALITAS ASET

1. Kewajiban BPR mengelola aset berdasarkan prinsip kehati-hatian
2. Kewajiban BPR menetapkan kualitas yang sama untuk seluruh aset produktif yang sama untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau proyek atau usaha yang sama.
3. Kewajiban BPR menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur atau proyek atau usaha yang sama dengan kriteria tertentu.

BAB III – PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET DAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN)

1. Kewajiban BPR menghitung PPKA umum dan khusus untuk setiap Aset Produktif
2. Kewajiban BPR membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan.

3. Selisih kurang antara PPKA dan CKPN diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan rasio KPMM.

BAB IV – RESTRUKTURISASI KREDIT

Pengaturan mengenai persyaratan, larangan, penetapan kualitas dan prinsip dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit.

BAB V – PROPERTI TERBENGGKALAI

Pengaturan mengenai penetapan, kriteria, dan konsekuensi kepemilikan properti terbenGGKALAI oleh BPR.

BAB VI – AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Pengaturan mengenai mekanisme, penilaian, dan konsekuensi atas agunan yang diambil alih.

BAB VII – HAPUS BUKU

Pengaturan mengenai pelaksanaan dan pembentukan pencadangan atas hapus buku.

BAB VIII – KEBIJAKAN PERKREDITAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN

1. Kewajiban BPR memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur perkreditan.
2. Kewajiban BPR melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan.

BAB IX – KETENTUAN PERALIHAN

1. Pengaturan mengenai pemberlakuan properti terbenGGKALAI yang dimiliki sebelum dan sesudah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
2. Pengaturan mengenai pemberlakuan penyertaan modal dan CKPN sejak 1 Januari 2025.

BAB X – PENUTUP

1. Pencabutan terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

1. Laporan Perbedaan Kualitas Aset Produktif
2. Penetapan Kualitas Aset Produktif dalam Bentuk Kredit, Surat Berharga, Penempatan Pada Bank Lain, dan Penyertaan Modal
3. Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perekonomian Rakyat

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN MENGENAI
KUALITAS ASET BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

A. Apa latar belakang penerbitan POJK?

Penyusunan POJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan penyesuaian peraturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih serta kegiatan usaha yang diperkenankan sesuai dengan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, penerbitan standar akuntansi keuangan entitas privat yang merupakan pengganti dari standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik yang akan berlaku 1 Januari 2025, evaluasi terhadap permasalahan dan penyelesaian atas pemberian kredit pasca pandemi covid-19, dan penyesuaian dengan ketentuan terkini serta penyempurnaan pengaturan yang berbasis prinsip.

B. Apa saja yang termasuk Aset Produktif?

Aset Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan penyertaan modal.

C. Apa saja yang termasuk Aset NonProduktif?

Aset Nonproduktif adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR.

D. Bagaimana penetapan kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR?

BPR wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPR yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap BPR dengan jumlah lebih dari Rp1 Miliar kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama;
- b. Aset Produktif yang diberikan oleh BPR dengan jumlah lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp1 Miliar kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 25 (dua puluh lima) debitur terbesar BPR tersebut, dan Aset Produktif yang diberikan oleh BPR lain kepada debitur tersebut lebih dari Rp1 Miliar; dan/atau
- c. Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Kredit bersama (sindikasi) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama.

Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset Produktif, kualitas yang ditetapkan oleh setiap BPR terhadap Aset Produktif wajib mengikuti kualitas yang paling rendah.

E. Bagaimana pelaporan BPR jika menetapkan kualitas yang berbeda untuk Aset Produktif yang diberikan kepada 1 Debitur?

BPR wajib menyampaikan laporan perbedaan kualitas berupa daftar Debitur beserta rincian untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

F. Bagaimana penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit?

Pada prinsipnya, kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit yang diberikan oleh setiap BPR kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha dinilai berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Namun demikian, kualitas Aset Produktif dalam bentuk Kredit yang diberikan oleh setiap BPR kepada 1 (satu) Debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha dengan jumlah paling banyak Rp5 Miliar dapat dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

G. Bagaimana penetapan kualitas Surat Berharga?

Kualitas Surat Berharga yang dimiliki BPR dapat digolongkan sebagai kualitas Lancar, Kurang Lancar atau Macet didasarkan antara lain peringkat investasi Surat Berharga dimaksud.

H. Apakah BPR diwajibkan melakukan perhitungan dan pembentukan PPKA sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini?

Ya, sampai dengan 31 Desember 2024 BPR wajib menghitung dan membentuk PPKA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Selanjutnya, sejak 1 Januari 2025 BPR wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan dan menghitung PPKA sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

I. Bagaimana konsekuensi apabila BPR kurang membentuk CKPN dari PPKA?

Terhadap selisih kurang antara PPKA dan CKPN, diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan rasio KPMM.

J. Bagaimana konsekuensi kepemilikan atas aset tetap yang ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai?

Dalam hal BPR telah melakukan upaya penyelesaian terhadap properti terbengkalai, namun belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, BPR wajib memperhitungkan Properti Terbengkalai yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sebesar:

- a. 15% (lima belas persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai;
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai; atau

- c. 100% (seratus persen) dari nilai Properti Terbengkalai yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sebagai Properti Terbengkalai.

K. Bagaimana konsekuensi kepemilikan atas aset tetap yang ditetapkan sebagai AYDA?

Pengambilalihan AYDA bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya terhitung sejak pengambilalihan AYDA oleh BPR. BPR wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan rasio KPMM sebesar:

- a. 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- c. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

BPR wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan selain berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan rasio KPMM sebesar:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- b. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun.

L. Apakah BPR wajib melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur perkreditan secara berkala?

Ya, BPR wajib melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur perkreditan secara berkala. Untuk menilai kecukupan serta efektivitas proses pemberian Kredit, BPR melaksanakan evaluasi secara berkala atas kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan. Periode pelaksanaan evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan setiap BPR dengan memperhatikan antara lain:

- a. Penerbitan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini;
- b. Strategi dan rencana bisnis BPR; dan/atau
- c. Kondisi terkini BPR.

M. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?

Pengaturan dalam POJK berlaku sejak tanggal diundangkan. Khusus pengaturan mengenai penyertaan modal dan CKPN berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.